

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Kota Magelang dan Kota Surakarta merupakan kutub pertumbuhan (*growth poles*) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013.
b. *Growth poles* di Provinsi Jawa Tengah hanya terpusat pada daerah timur Jawa Tengah dan masih terdapat 21 kabupaten/kota dengan pertumbuhan *substandard*.
2. Ketimpangan yang diukur dengan menggunakan indeks entropi Theil dan indeks Williamson mengalami nilai yang berbeda. Dimana indeks entropi Theil mengalami fluktuasi dan menunjukkan rata-rata nilai sebesar 0,07356. Sedangkan indeks Williamson mengalami peningkatan dan menunjukkan rata-rata nilai sebesar 0,10135.
3. Rata-rata lama sekolah berpengaruh secara positif dan signifikan, namun angka harapan hidup berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi pemerintah dan tenaga kerja juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2. Saran

1. a. Terkait dengan *growth poles*, pemerintah harus mengatur kebijakan pembangunan daerah. Dengan mengembangkan kerjasama antar kabupaten/kota pada sektor-sektor yang potensial atau sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Khususnya kerjasama antara daerah inti dan *hinterland*, sehingga daerah inti bersifat mendorong daerah belakangnya, selanjutnya kerjasama tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di kabupaten/kota yang kurang berkembang dan pada gilirannya diharapkan akan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi pada daerah *hinterland* yang diharapkan dapat
- b. memperbaiki ketimpangan spasial.

Terkait dengan daerah pertumbuhan *substandard*, para pembuat kebijakan pembangunan hendaknya membatasi pembangunan dan tidak memfokuskan pembangunan pada daerah pusat pertumbuhan. Kebijakan yang demikian penting untuk meminimalisir arus urbanisasi tenaga kerja ke daerah pusat pertumbuhan yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadikan daerah pertumbuhan *substandard* sebagai penyangga kebutuhan dan dapat dioptimalkan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, strategi pembangunan pada daerah pertumbuhan *substandard* dapat dilakukan dengan percepatan pembangunan melalui insentif penyediaan akses dan infrastruktur pada daerah pertumbuhan *substandard* guna menarik

para dunia usaha untuk melakukan investasi sehingga menciptakan kegiatan perekonomian.

2. Adanya ketimpangan yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan daerah yang tertinggal untuk meningkatkan perekonomiannya dengan cara memberikan bantuan seperti fasilitas infrastruktur, dana pendidikan maupun kesehatan, dana pembangunan, sehingga sektor unggulan dan potensial dapat berkontribusi secara optimal terhadap pendapatan daerah.
3. Terkait dengan pengaruh modal manusia terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, seharusnya alokasi anggaran belanja daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan harus diperbesar yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan, serta akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan tenaga kerja. Investasi pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat hendaknya meningkatkan pemberian dana anggaran belanja pembangunan kepada daerah agar dapat meningkatkan sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mengingat juga terdapatnya pengaruh tenaga kerja secara positif dan signifikan maka perlu adanya peningkatan tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan pelatihan kerja baik secara informal maupun formal, selain itu juga memperluas lapangan pekerjaan dengan mendorong para dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terkait dalam penelitian *growth poles*, penelitian ini hanya mengidentifikasi daerah lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel yang digunakan sebagai pengukur investasi hanya diwakili oleh variabel investasi pemerintah karena keterbatasan data pada variabel investasi swasta.

